

A wide-angle photograph of a group of fishermen on a beach at dusk. They are wading in the shallow water, pulling in large fishing nets. The sky is a mix of blue and orange, and the background shows a hilly coastline.

PEDOMAN SUKARELA UNTUK MEWUJUDKAN PERIKANAN SKALA KECIL BERKELANJUTAN DALAM KONTEKS KETAHANAN PANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN

(VOLUNTARY GUIDELINES FOR SECURING SUSTAINABLE
SMALL-SCALE FISHERIES IN THE CONTEXT OF FOOD SECURITY
AND POVERTY ERADICATION)



Diterbitkan oleh:

International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)

27 College Road Chennai 600 006 India
Phone: (91) 44-2827 5303, Fax: (91) 44-2825 4457
Email: icsf@icsf.net Website: www.icsf.net

ICSF adalah LSM internasional yang bekerja pada isu-isu yang menjadi perhatian masyarakat perikanan seluruh dunia. ICSF terdaftar dalam Konsil Ekonomi dan Sosial Dewan PBB dan pada Daftar Khusus ILO untuk *Non-Governmental International Organizations*. ICSF juga berstatus sebagai *Liaison* FAO.

Sebagai jaringan global *community organizer*, guru, teknisi, peneliti dan ilmuwan, kegiatan ICSFs mencakup pemantauan dan penelitian, pertukaran dan pelatihan, kampanye dan aksi, serta kegiatan kemasyarakatan.



Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia

Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh:

**Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia
Indonesian Traditional Fisherfolk Union (KNTI)**

www.knti.or.id, Email: dppknti@gmail.com

KNTI adalah organisasi nelayan tradisional. Memiliki cabang di 24 wilayah di Indonesia, KNTI bertujuan memberdayakan nelayan dan organisasi nelayan.

2015

Dicetak oleh:

Graphic Prints

#13, Swamy Naicken Street, Chintadripet, Chennai 600 002.

Ilustrasi dan Desain oleh Arjun Shankar ISBN 978 93 80802 46



<http://www.jajarkarang.com/>

Pedoman Sukarela untuk Mewujudkan Perikanan Skala Kecil Berkelanjutan dalam Konteks Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan (Pedoman SSF) diadopsi oleh negara-negara Anggota FAO (Food and Agriculture Organization) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan secara resmi disetujui sebagai instrumen internasional pada bulan Juni 2014.

Hal istimewa dari Pedoman SSF adalah bahwa instrumen ini diciptakan sebagai hasil dari sejarah sangat panjang perjuangan para pekerja perikanan skala kecil di seluruh dunia yang menginginkan pengakuan lebih luas tentang status dan peran mereka di masing-masing negara.

Meskipun di seluruh dunia nelayan skala kecil adalah tulang punggung perekonomian perikanan, mereka telah diabaikan dan sering didiskriminasi dalam proses modernisasi sektor perikanan. Walaupun diabaikan, sektor ini telah bertahan dan tetap hidup di hampir semua negara.

Meskipun demikian, sebagai akibat dari “pengabaian resmi” selama sekian lama, masyarakat perikanan skala kecil di berbagai negara dan telah berkontribusi paling besar di sektor perikanan tangkap, tetap miskin dan terpinggirkan serta dirampas hak asasi manusia mereka demi pembangunan

sosial ekonomi dan budaya.

Pedoman SSF adalah pengakuan oleh negara-negara anggota FAO tentang fakta ini, dan pada saat yang sama juga merupakan upaya untuk mengembalikan perikanan skala kecil ke titik fokus pembangunan dan manajemen perikanan.

ICSF (International Collective in Support of Fishworker/ Perkumpulan Internasional untuk Mendukung Pekerja Perikanan) adalah salah satu organisasi masyarakat sipil terkemuka yang berperan dalam membuat perumusan Pedoman ini menjadi proses yang sangat partisipatif. Bahkan, pedoman ini secara resmi didedikasikan oleh FAO/ PBB untuk mengenang Chandrika Sharma, Sekretaris Eksekutif ICSF, yang adalah seorang pembela hak-hak pekerja perikanan skala kecil di seluruh dunia. Chandrika telah hilang dalam penerbangan Malaysia Airlines MH 370 pada bulan Maret 2014; saat itu ia

sedang dalam perjalanan ke Mongolia untuk menghadiri Konferensi FAO dan bertujuan untuk mendukung diterimanya Pedoman SSF.

Terdapat 300 paragraf dalam Pedoman SSF yang terbagi dalam 13 bagian. Dokumen ini hanya sebuah ringkasan dari keseluruhan isi Pedoman SSF. Ringkasan ini dibuat untuk ICSF oleh John Kurien, Anggota pendiri ICSF, yang telah bekerja bersama masyarakat perikanan skala kecil sejak 40 tahun terakhir di berbagai wilayah dunia, khususnya Kerala, India.

KATA PENGANTAR

Pedoman SSF dikembangkan sebagai pelengkap Kode Etik untuk Perikanan Bertanggung Jawab yang diluncurkan FAO tahun 1995. Pedoman ini membahas perikanan skala kecil dan mencakup keseluruhan kegiatan dalam rantai ekonomi yang dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan. Perikanan skala kecil memberikan kontribusi separuh dari tangkapan ikan global dan mempekerjakan 90 persen nelayan dan pekerja perikanan dunia. Perikanan skala kecil dan masyarakat nelayan merupakan subsektor yang beragam dan dinamis dengan karakteristik tertentu yang bergantung pada lokasi mereka. Seringkali mereka merupakan usaha keluarga dan terikat kuat di komunitas lokal. Mereka terus terpinggirkan.

Kemiskinan pada masyarakat perikanan skala kecil bersifat multidimensi. Mewujudkan dan meningkatkan kontribusi perikanan skala kecil menghadapi banyak tantangan dan kendala. Pedoman SSF ini dikembangkan melalui proses yang unik, partisipatif dan konsultatif. Pedoman ini mengedepankan dan konsisten dengan standar hak asasi manusia internasional.





www.visitmodem.files.wordpress.com



Perikanan skala kecil memberikan kontribusi separuh dari tangkapan ikan global dan mempekerjakan 90 persen nelayan dan pekerja perikanan dunia. Perikanan skala kecil dan masyarakat nelayan merupakan subsektor yang beragam dan dinamis dengan karakteristik tertentu yang bergantung pada lokasi mereka.

1. TUJUAN

Tujuan dari Pedoman SSF adalah untuk memastikan bahwa perikanan kecil akan:

- meningkatkan ketahanan pangan global;
- mempromosikan kontribusi Pedoman SSF terhadap masa depan ekonomi dan sosial dari planet bumi;
- berkontribusi untuk memperbaiki situasi sosial ekonomi pekerja perikanan; dan
- mencapai pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Dalam proses ini, Pedoman SSF harus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran, kontribusi dan potensi perikanan skala kecil.

Tujuan-tujuan ini harus dicapai melalui promosi dari pendekatan yang berlandaskan hak asasi manusia. Masyarakat nelayan skala kecil harus diberdayakan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas pemanfaatan sumber daya perikanan.

Penekanan Pedoman ini adalah pada kebutuhan negara berkembang serta kepedulian dan keuntungan bagi kelompok rentan dan terpinggirkan di kalangan masyarakat nelayan skala kecil.





2. SIFAT DAN CAKUPAN

Pedoman SSF bersifat sukarela dan berlingkup global, dengan fokus pada negara-negara berkembang. Pedoman ini dimaksudkan meliputi semua kegiatan yang terkait perikanan laut dan perikanan perairan darat. Pedoman SSF ditujukan kepada semua pemangku yang terkait dengan perikanan, yaitu: negara, LSM internasional, organisasi masyarakat sipil, LSM, institusi akademik, dan sektor swasta. Pedoman ini mengakui keragaman perikanan skala kecil dan mengakui bahwa tidak ada definisi standar bagi mereka. Negara harus melalui proses partisipatif dan transparan dalam menentukan perikanan yang dikategorikan skala kecil - sehingga masuk dalam lingkup pedoman ini - serta mengidentifikasi orang-orang yang paling rentan di dalamnya, karena pedoman ini sangat relevan bagi mereka. Pedoman SSF harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan sistem hukum dan lembaga nasional.





3. PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN

Pedoman ini didasarkan pada 13 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut merujuk pada standar hak asasi manusia internasional, standar dan perikanan yang bertanggung jawab dan praktek pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan serta kebutuhan untuk mendukung realisasi progresif hak atas kecukupan pangan.

Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Hak asasi dan martabat manusia;
2. Menghormati budaya;
3. Tidak diskriminatif;
4. Kesetaraan dan keadilan gender;
5. Kesetaraan dan keadilan;
6. Konsultasi dan partisipasi;
7. Aturan hukum;
8. Transparansi;
9. Akuntabilitas;
10. Keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan;
11. Pendekatan holistik dan terintegrasi;
12. Tanggung jawab sosial; dan
13. Kelayakan dan kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi.

4. HUBUNGAN DENGAN INSTRUMEN INTERNASIONAL LAINNYA

Pedoman SSF harus ditafsirkan dan diterapkan konsisten dengan hak dan kewajiban yang ada di bawah hukum nasional dan internasional, dan dengan memperhatikan komitmen sukarela di bawah instrumen regional dan internasional yang berlaku.

Pedoman ini dapat digunakan untuk memandu dan menginspirasi perubahan baru atau ketentuan legislatif dan peraturan tambahan. Namun, tidak ada bagian dalam Pedoman SSF yang harus diartikan sebagai membatasi atau mengurangi hak atau kewajiban negara yang mungkin merupakan subyek di bawah hukum internasional.





2. SIFAT DAN CAKUPAN

Pedoman SSF bersifat sukarela dan berlingkup global, dengan fokus pada negara-negara berkembang. Pedoman ini dimaksudkan meliputi semua kegiatan yang terkait perikanan laut dan perikanan perairan darat. Pedoman SSF ditujukan kepada semua pemangku yang terkait dengan perikanan, yaitu: negara, LSM internasional, organisasi masyarakat sipil, LSM, institusi akademik, dan sektor swasta. Pedoman ini mengakui keragaman perikanan skala kecil dan mengakui bahwa tidak ada definisi standar bagi mereka. Negara harus melalui proses partisipatif dan transparan dalam menentukan perikanan yang dikategorikan skala kecil - sehingga masuk dalam lingkup pedoman ini - serta mengidentifikasi orang-orang yang paling rentan di dalamnya, karena pedoman ini sangat relevan bagi mereka. Pedoman SSF harus ditafsirkan dan diterapkan sesuai dengan sistem hukum dan lembaga nasional.





3. PRINSIP-PRINSIP PEDOMAN

Pedoman ini didasarkan pada 13 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut merujuk pada standar hak asasi manusia internasional, standar dan perikanan yang bertanggung jawab dan praktek pembangunan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelompok-kelompok rentan dan terpinggirkan serta kebutuhan untuk mendukung realisasi progresif hak atas kecukupan pangan.

Prinsip-prinsip ini meliputi:

1. Hak asasi dan martabat manusia;
2. Menghormati budaya;
3. Tidak diskriminatif;
4. Kesetaraan dan keadilan gender;
5. Kesetaraan dan keadilan;
6. Konsultasi dan partisipasi;
7. Aturan hukum;
8. Transparansi;
9. Akuntabilitas;
10. Keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan;
11. Pendekatan holistik dan terintegrasi;
12. Tanggung jawab sosial; dan
13. Kelayakan dan kelangsungan kehidupan sosial dan ekonomi.

5. TATA LAKSANA TENURIAL DALAM PERIKANAN SKALA KECIL DAN MANAJEMEN SUMBERDAYA

A. TATA LAKSANA KEPEMILIKAN YANG BERTANGGUNG JAWAB

Tata laksana tenurial sumberdaya yang bertanggung jawab adalah sangat penting bagi tercapainya pembangunan sosial ekonomi dan budaya serta terpenuhinya hak-hak asasi manusia bagi masyarakat nelayan skala kecil. Masyarakat perikanan skala kecil harus memiliki hak tenurial yang aman serta adil dan layak secara sosial-budaya terhadap sumber daya perikanan, daerah penangkapan ikan, serta lahan dan hutan di sekitarnya. Perhatian khusus harus diberikan untuk hak tenurial perempuan. Semua bentuk hak tenurial yang sah harus diidentifikasi, dicatat dan dihormati. Ini harus dilakukan, jika perlu diatur dengan undang-

undang, khususnya dengan mempertimbangkan hak-hak adat dan preferensial untuk sumberdaya air dan tanah masyarakat adat dan etnis minoritas. Apabila reformasi hukum telah memberikan hak kepada perempuan, mereka harus secara layak diakomodasi dalam sistem tenurial adat. Peran masyarakat perikanan skala kecil dan masyarakat adat untuk memulihkan, melestarikan, melindungi dan mengelola secara bersama-sama perairan lokal dan ekosistem pesisir harus diakui. Apabila negara memiliki atau menguasai tanah dan sumberdaya air, hak tenurial mereka harus ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan sosial ekonomi dan lingkungan, khususnya apabila digunakan dan dikelola secara kolektif oleh

masyarakat perikanan skala kecil.

Pemberian akses khusus bagi perikanan skala kecil untuk menangkap ikan di perairan nasional tercantum dalam Kode Etik untuk Perikanan Bertanggung Jawab (Pasal 6.18). Berdasarkan hal ini, negara harus memberlakukan langkah-langkah seperti membentuk zona eksklusif untuk perikanan skala kecil. Sebelum memberikan akses sumber daya kepada pihak ketiga, klaim masyarakat nelayan skala kecil terhadap area semacam harus dijadikan pertimbangan utama.

Adanya pihak-pihak lain menyebabkan meningkatnya persaingan di area perikanan skala kecil, yang akan mengarah ke konflik. Negara harus menjamin bahwa masyarakat perikanan skala

kecil diberi dukungan khusus dan tidak diusir secara sewenang-wenang atau hak tenurial mereka yang sah dilanggar atau tidak diakui. Dalam kasus proyek pembangunan berskala besar, negara dan pihak-pihak lain harus mengadakan konsultasi serius dan melakukan studi dampak yang relevan untuk menghindari dampak buruknya pada masyarakat perikanan skala kecil.

Perselisihan atas hak tenurial yang melibatkan masyarakat perikanan skala kecil harus diselesaikan oleh negara pada waktu yang tepat, terjangkau dan efektif dengan penyelesaian termasuk restitusi, ganti rugi, kompensasi dan perbaikan yang adil, dan segera dilaksanakan.

Perpindahan karena bencana alam dan/ atau konflik bersenjata semakin mempengaruhi masyarakat nelayan skala kecil. Negara harus mengambil segala upaya untuk memulihkan akses

ke lahan perikanan tradisional dan tanah pesisir, untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan. Dalam keadaan semacam ini, harus diadakan mekanisme untuk mendukung masyarakat yang terdampak adanya pelanggaran HAM berat agar bisa membangun kembali kehidupan mereka, dan segala diskriminasi terhadap perempuan dalam pelaksanaan hak tenurial harus dihilangkan.

B. PENGELOLAAN SUMBERDAYA YANG BERKELANJUTAN

Langkah-langkah yang tepat harus diambil untuk konservasi jangka panjang dan kemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, hambatan dan peluang perikanan skala kecil perlu diidentifikasi. Hak harus sejalan dengan tanggung jawab. Hak tenurial diimbangi dengan tugas-tugas yang difokuskan untuk konservasi dan pemanfaatan

berkelanjutan.

Perikanan skala kecil harus menggunakan praktek-praktek yang tidak membahayakan lingkungan dan spesies ikan terkait. Negara harus mendukung perikanan skala kecil untuk bertanggung jawab atas pengelolaan sumberdaya. Negara harus melibatkan masyarakat dalam desain, perencanaan dan pelaksanaan langkah-langkah manajemen, memastikan partisipasi yang setara dari perempuan dan kelompok rentan lainnya. Dalam lingkup hukum nasional, negara harus mempromosikan sistem manajemen partisipatif.

Negara harus membangun dan mempromosikan sistem pemantauan, pengendalian dan pengawasan (MCS) yang bisa diterapkan dan cocok untuk perikanan skala kecil. Negara harus berusaha untuk menangkal, mencegah dan menghilangkan semua praktek penangkapan ikan

ilegal dan merusak, dan nelayan skala kecil harus mendukung sistem MCS serta memberikan informasi yang diperlukan kepada pemerintah untuk tujuan pengelolaan.

Negara harus memperjelas peran dan tanggung jawab semua pihak karena pengelolaan berdasarkan manajemen bersama, serta menggunakan proses yang legal. Perikanan skala kecil harus terwakili dalam perkumpulan dan lembaga profesi tingkat lokal maupun nasional terkait, dan berperan aktif dalam keputusan dan proses pembuatan kebijakan perikanan.

Dalam mempromosikan sistem manajemen bersama, baik negara dan nelayan skala kecil harus mendukung peran laki-laki dan perempuan terlibat dalam pemanenan, serta operasi sebelum dan pasca panen, agar dapat menyumbangkan pengetahuan, perspektif dan kebutuhan mereka.

Negara harus memastikan bahwa hak-hak tenurial masyarakat nelayan skala kecil dilindungi, dalam hal terjadi isu-isu lintas batas yang berkaitan dengan perairan dan sumber daya bersama.

Negara harus menghindari kebijakan dan skema keuangan yang akan mengarah pada terjadinya kelebihan kapasitas perikanan, yang menyebabkan terjadinya penangkapan ikan yang berlebihan dan memiliki dampak negatif terhadap perikanan skala kecil.





<http://www.aktual.com/>

6. PEMBANGUNAN SOSIAL, LAPANGAN KERJA, DAN PEKERJAAN YANG LAYAK



Semua pihak harus mengambil pendekatan holistik untuk pembangunan dan manajemen perikanan skala kecil. Negara harus mempromosikan investasi dalam bidang kesehatan, pendidikan, pemberantasan buta huruf, inklusi pengetahuan digital, dan keterampilan teknis lainnya.

Negara harus mempromosikan skema jaminan sosial untuk semua pekerja perikanan skala kecil di seluruh mata rantai ekonominya. Negara harus mendukung pengembangan skema tabungan, kredit dan asuransi, dengan penekanan pada inklusi dan akses perempuan ke layanan ini.

Semua pihak harus mengakui bahwa keseluruhan rantai kegiatan perikanan skala kecil sebagai

kegiatan ekonomi yang profesional.

Negara harus mengutamakan pekerjaan yang layak bagi semua.

Negara harus memastikan kemajuan realisasi hak nelayan skala kecil dan pekerja perikanan terhadap standar hidup yang layak. Negara harus menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif, non-diskriminatif, dan positif, agar para pekerja ini mendapatkan imbalan yang adil dari pekerjaan, modal dan pengelolaan mereka. Negara dan semua pihak harus mendukung adanya peluang-peluang alternatif untuk mengembangkan pendapatan. Kondisi yang mendukung harus diciptakan untuk masyarakat nelayan skala kecil agar dapat melaksanakan kegiatan perikanan mereka.

Migrasi adalah strategi mencari penghidupan yang umum dilakukan. Negara harus mengetahui dan mengatasi penyebab mendasar dan akibat dari perpindahan lintas batas nelayan.

Negara harus mengatasi masalah kesehatan kerja, keselamatan dan kondisi kerja yang tidak adil. Negara harus menghapus adanya kerja paksa dan mencegah terjadinya jeratan utang.

Negara harus menyediakan akses ke sekolah dan fasilitas pendidikan, menyadari pentingnya kesejahteraan anak-anak dan pendidikan bagi masa depan mereka.

Kompleksitas kebutuhan keselamatan di laut dan perairan daratan serta penyebab kekurangannya harus diakui oleh semua pihak.

Keselamatan dan kesehatan kerja perikanan skala kecil harus diintegrasikan ke dalam manajemen umum perikanan.

Negara harus melindungi hak asasi dan martabat semua pemangku kepentingan perikanan skala kecil apabila terjadi konflik bersenjata.



7. RANTAI EKONOMI, PASCA PANEN, DAN PERDAGANGAN

Peran sentral dari sub-sektor pasca panen perikanan skala kecil harus diakui oleh semua pihak. Kemampuan memainkan peran sentral dalam pasca panen sub-sektor dan ini harus diakui oleh semua pihak.

Investasi yang tepat pada infrastruktur, struktur organisasi dan pengembangan kapasitas pasca panen sub-sektor perikanan harus disediakan dan dibina oleh negara.

Bentuk-bentuk tradisional serikat nelayan dan pekerja perikanan harus diakui.

Harus dicari cara untuk menghindari kerugian pasca panen dan menciptakan nilai tambah.

Negara harus mempromosikan perdagangan yang adil

dan non-diskriminatif bagi produk perikanan skala kecil di pasar lokal, nasional, regional dan internasional. Promosi perdagangan ikan internasional seharusnya tidak merugikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat karena ikan merupakan makanan murah yang sangat penting untuk pangan dan keseimbangan gizi secara keseluruhan.

Manfaat dari perdagangan internasional harus didistribusikan dengan adil dan sistem manajemen perikanan yang efektif harus diterapkan untuk mencegah eksploitasi perikanan yang berlebihan karena dorongan permintaan pasar.

Analisis lingkungan, sosial dan penilai lainnya yang relevan (antara lain) harus menjadi bagian

integral kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan untuk memastikan bahwa dampak negatif perdagangan internasional terhadap lingkungan dan budaya, ketahanan pangan, dan mata pencaharian perikanan skala kecil dapat diukur dan ditangani secara adil.

Akses terhadap informasi pasar dan perdagangan bagi semua pemangku kepentingan dalam rantai ekonomi perikanan skala kecil harus difasilitasi oleh negara.

8. KESETARAAN GENDER

Pengarusutamaan gender harus menjadi bagian integral dari semua strategi pembangunan perikanan skala kecil. Negara harus mematuhi kewajiban mereka di bawah hukum hak asasi manusia internasional dan menerapkan instrumennya, di mana negara adalah pihak yang berkaitan dengan isu-isu perempuan.

Langkah-langkah khusus untuk mengatasi diskriminasi terhadap perempuan harus diadopsi. Kesetaraan gender harus diwujudkan dengan menetapkan kebijakan dan undang-undang dan mengubah kebijakan yang tidak kompatibel dengan tujuan ini.

Sistem evaluasi fungsional harus dikembangkan untuk menilai dampak dari undang-undang, kebijakan dan tindakan-tindakan untuk memperbaiki status perempuan dan mencapai kesetaraan gender.

Teknologi yang lebih baik dan sejalan dengan pentingnya pekerjaan perempuan harus dikembangkan.



9. RESIKO BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

Memerangi perubahan iklim memerlukan tindakan segera dengan target tinggi. Perhatian khusus harus diberikan kepada masyarakat nelayan skala kecil yang tinggal di pulau-pulau kecil. Diperlukan sebuah pendekatan terpadu dan holistik dengan kolaborasi lintas-sektoral. Rencana untuk adaptasi, mitigasi dan bantuan yang sesuai harus disediakan.

Dalam kasus bencana yang disebabkan oleh manusia berdampak pada perikanan skala kecil, para pihak yang bertanggung jawab harus memberikan pertanggungjawaban. Dampak dari perubahan iklim dan bencana terhadap aspek yang berbeda dari kegiatan pasca panen dan perdagangan harus diperhitungkan. Konsep “membangun kembali dengan cara yang lebih baik” harus diterapkan dalam merespon bencana dan rehabilitasinya. Efisiensi energi di seluruh rantai ekonominya harus didorong dan dikedepankan.





10. KESESUAIAN KEBIJAKAN, KOORDINASI INSTITUSI DAN KOLABORASI

Untuk mempromosikan pembangunan holistik dalam komunitas perikanan skala kecil, negara harus mengakui dan mewujudkan kesesuaian kebijakan.

Negara harus mengembangkan dan menggunakan pendekatan perencanaan tata ruang, dengan mempertimbangkan kepentingan perikanan skala kecil dan perannya dalam pengelolaan wilayah pesisir terpadu.

Negara harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan harmonisasi kebijakan yang mempengaruhi kesehatan dan ekosistem laut dan perairan darat.

Kebijakan perikanan harus memberikan visi jangka panjang bagi perikanan skala kecil yang berkelanjutan.

Harus ada bagian kontak yang jelas di instansi dan otoritas pemerintah untuk masyarakat perikanan skala kecil.

Pemangku kepentingan perikanan skala kecil harus mempromosikan kerjasama antar organisasi mereka.

Negara harus mempromosikan struktur pemerintahan lokal yang berkontribusi terhadap manajemen perikanan skala kecil yang efektif. Kerjasama internasional, regional dan sub-regional diperlukan untuk mewujudkan perikanan skala kecil yang berkelanjutan.









<http://image.metrovnews.com/>

11. INFORMASI, RISET DAN KOMUNIKASI

Negara harus menetapkan secara transparan suatu sistem pengumpulan data yang relevan untuk pengambilan keputusan tentang pengelolaan perikanan skala kecil yang berkelanjutan. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan komunikasi dan informasi. Negara harus berusaha mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, dan meminta pertanggungjawaban para pengambil keputusan.

Masyarakat nelayan skala kecil adalah pemegang, penyedia dan penerima pengetahuan. Informasi yang relevan yang diperlukan perikanan skala kecil yang bertanggung jawab dan pembangunan berkelanjutan, harus tersedia. Pengetahuan, budaya, praktik dan teknologi dari masyarakat perikanan skala kecil harus diakui dan didokumentasikan.

Negara harus memberikan dukungan kepada masyarakat perikanan skala kecil - terutama

perempuan dan masyarakat adat - yang mengandalkan penangkapan ikan secara subsisten. Platform dan jaringan yang tepat di tingkat komunitas, nasional dan tingkat lebih tinggi harus digunakan untuk mempermudah aliran pertukaran informasi.

Negara harus menyediakan dana untuk penelitian perikanan skala kecil dan mendorong pengumpulan data dan analisis untuk menjadi kolaboratif dan partisipatif.

Negara harus mempromosikan penelitian di berbagai area dalam konteks hubungan gender, untuk menginformasikan strategi yang memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan dalam perikanan. Mengakui peran perikanan skala kecil serta untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat gizi dari makan ikan, negara harus mempromosikan konsumsi ikan dalam program pendidikan konsumen.

12. PENGEMBANGAN KAPASITAS

Kapasitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan harus didorong. Negara harus menyediakan fasilitas pengembangan kapasitas bagi perikanan skala kecil agar mendapat kesempatan dan keuntungan dari pasar.

Pengembangan kapasitas harus merupakan proses dua arah. Pengetahuan dan keterampilan harus dikembangkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan suksesnya sistem manajemen bersama.









13. DUKUNGAN DAN PEMANTAUAN IMPLMENTASI

Semua pihak didorong untuk menerapkan Pedoman SSF.

PBB dan Badan-badan khusus PBB harus mendukung upaya sukarela negara anggota untuk menerapkan Pedoman ini.

Negara dan semua pihak lainnya harus bekerja sama untuk menciptakan kesadaran tentang Pedoman SSF, dan menyebarkan versi yang disederhanakan dan diterjemahkan.

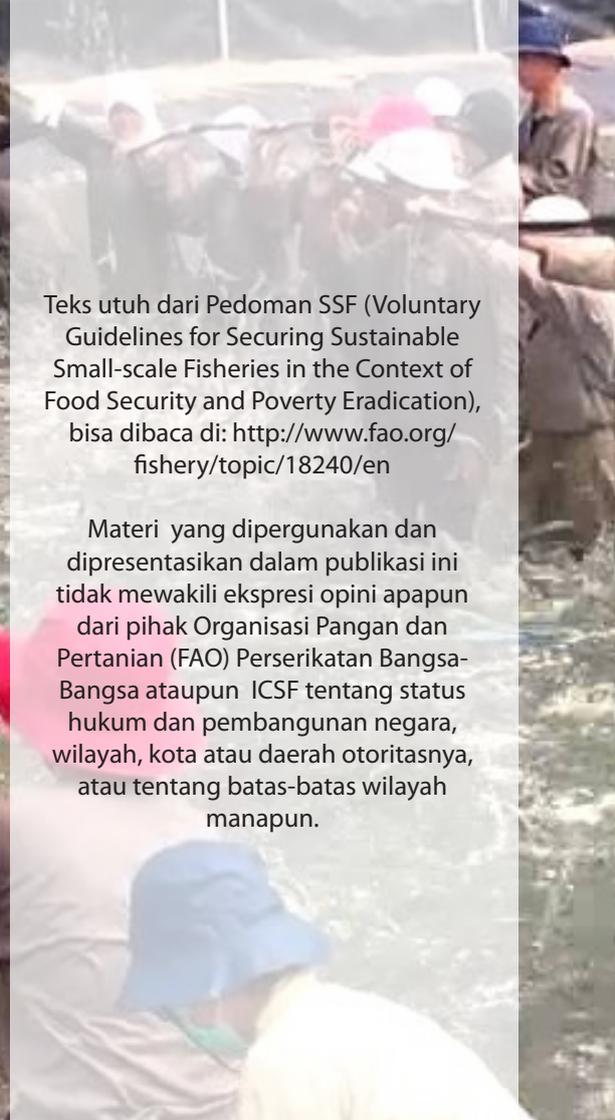
Pentingnya sistem monitoring harus diakui. Perwakilan yang sah dari masyarakat perikanan skala kecil harus terlibat, baik dalam pengembangan dan penerapan strategi implementasi Pedoman SSF maupun dalam pemantauannya.

FAO harus mempromosikan dan mendukung pengembangan Program Asistensi Global.



Teks utuh dari Pedoman SSF (Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication), bisa dibaca di: <http://www.fao.org/fishery/topic/18240/en>

Materi yang dipergunakan dan dipresentasikan dalam publikasi ini tidak mewakili ekspresi opini apapun dari pihak Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun ICSF tentang status hukum dan pembangunan negara, wilayah, kota atau daerah otoritasnya, atau tentang batas-batas wilayah manapun.





Food and Agriculture Organization
of the United Nations



Norad



International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
27 College Road, Chennai 600 006, India